

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, cet. III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik Indonesia*, cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- BN Marbun, 2006, *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dedi Nordiawan, dkk, 2008, *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, Salemba Empat, Jakarta.
- Hanif Nurcholish, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cetakan II, Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta.
- Haw. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Indra Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Cetakan Pertama, Alumni, 2004, Bandung.

Lembaga Administrasi Negara. 2008, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, LAN, Jakarta.

Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan V, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.

Muji Estiningsih, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Paimin Napitupulu, 2007, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, cetakan Pertama, PT. Alumni, 2007, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira dan Dede Mariana, 2007, *Perihal Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sebastian Salang dan M. Djadjiono, 2009, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, Cetakan Pertama, Forum Sahabat, Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta.

Soehino, 2004, *Ilmu Negara*, cetakan VI, Liberty, Yogyakarta.

Soekarwo, 2003, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

2. Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi RI, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Menkumham RI, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Menkumham, Jakarta.

Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Setneg RI, Jakarta.

Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Setneg, Jakarta.

Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Setneg, Jakarta.

Sekretariat Negara RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Setneg, Jakarta.

Bagian Hukum Kabupaten Pati, *Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati*, Bagian Hukum Kabupaten Pati.

Bagian Hukum Kabupaten Pati, *Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2014 Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati*. Bagian Hukum Kabupaten Pati.

Bagian Hukum Kabupaten Pati, *Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017*. Bagian Hukum Kabupaten Pati.

3. Jurnal

Juharni dan Umar, Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Binjai, *Jurnal Ilmiah Ad'ministrare*, Vol 3, Nomor 1, 2016, hal. 2.

4. Internet

Muhammad Fattakhy Ulinuha, *Pengertian Analisis Data*, Diakses dari Internet: <http://fattakhy.pad.com>, Tanggal 25 Juli 2012, hal. 1.